

BAB 2

DINAMIKA POLITIK PKS

Bab kedua ini menguraikan tentang kebijakan konstitusi, lahirnya PKS di Indonesia, visi & misi, paradigma politik, budaya politik, rekrutmen, dan pemingkiaan ideologi transnasionalisme.

2.1 Kebijakan Konstitusi

2.1.1 UUD 1945

Pasal 28 UUD 1945 menjamin kebebasan untuk berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Hal ini berarti setiap orang Indonesia berhak berkumpul ke dalam partai-partai politik. Selanjutnya, pasal 28C ayat 2 menjamin hak setiap warga negara untuk berjuang bersama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Jadi, partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam arena kontestasi perpolitikan Indonesia pascareformasi.

Pasal 22E ayat 3 menyatakan bahwa partai politik adalah satu-satunya “kendaraan” yang dapat mengantarkan seseorang menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dominansi partai politik relatif kuat terlihat pada pasal 24C ayat 1, sebab otoritas pembubaran partai politik hanya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

2.1.2 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD

1945. Partai politik bebas memilih azas dan ciri tertentu sejauh tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Partai politik merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila dan UUD 1945 (pasal 9). Secara khusus partai politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik anggotanya dan masyarakat, juga memperjuangkan cita-cita (visi dan misi) partai politik tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 10, ayat 2, huruf a dan b). Jadi, partai politik harus mengemban fungsi-fungsi pendidikan politik, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi, partisipasi politik masyarakat, serta rekrutmen politik yang demokratis dengan memperhatikan kestarwaan dan keadilan gender (pasal 11).

Organisasi partai politik secara hirarkis berada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (pasal 17 ayat 1), namun dimungkinkan pula untuk membentuk organisasi hingga tingkat desa/kelurahan/atau wilayah yang setara dengan itu (pasal 17 ayat 2). Di samping itu, partai politik juga dapat membentuk badan khusus yang bertugas menjaga kehormatan, dan martabat partai beserta anggota-anggotanya (pasal 21), serta membentuk dan memiliki organisasi sayap (pasal 12 huruf j). Partai politik dinyatakan bubar jika membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan oleh (MK) Mahkamah Konstitusi (pasal 41). (Munandar, 2004).

2.1.3 Falsafah Dasar Perjuangan PKS

Falsafah Dasar Perjuangan PKS menyebutkan ada tujuh pilar politik Islam, yaitu:

1. lebih mengutamakan pelayanan *ketimbang* kekuasaan semata.
2. Tanggungjawab bersama dalam mengelola negara
3. Kebebasan yang bertanggungjawab,
4. Keadilan dan kesederajatan tanpa diskriminasi,

5. Keadilan sosial yang merata,
6. Kemerdekaan yang terbimbing, serta hukum dan undang-undang yang menjadi panglima.
7. Tujuan berpolitik adalah menciptakan kehidupan bersama yang teratur, aman, dan sejahtera, juga keanekaragaman individu dan kelompok yang memperjuangkannya dapat diwadahi dalam sistem yang berbentuk organisasi sosial, partai politik, masyarakat, dan negara.

Konsekuensi logis dari hal yang telah disebutkan di atas, yaitu pembentukan negara yang kuat melalui pendidikan yang integral bagi seluruh warga negara, keadilan politik, serta pemerintahan yang baik dan bersih, adalah suatu keniscayaan. Di sisi lain, mengingat kondisi objektif masyarakat yang majemuk, negara harus memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara, tanpa memandang perbedaan ideologi atau agama, sejauh, warga negara yang bersangkutan tidak memecahbelah keutuhan warga negara, merusak keamanan negara, serta menciderai keyakinan warga negara yang lain.

2.1.4 Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PKS.

Pasal 1 ayat 2 Anggaran Dasar PKS menegaskan bahwa PKS merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK). PKS berazaskan Islam (pasal 2), dengan tujuan mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, serta mewujudkan masyarakat madani yang diridhai oleh Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 5). Oleh karena itu, kegiatan di bidang politik, pendidikan, pelatihan kader, dakwah, hukum, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh PKS (pasal 7). Kemudian, tujuan tersebut dirinci lebih lanjut menjadi sejumlah sasaran, kegiatan, untuk mencapainya, yang dibahas dalam Bab II, pasal 2, 3, dan 4 ART PKS.

PKS memiliki tiga jenis keanggotaan, yaitu Anggota Pendukung, Anggota Inti, dan Anggota Kehormatan (AD pasal 9). Anggota Pendukung terdiri dari Anggota Pemula dan Anggota Muda, sedangkan Anggota Inti terdiri dari Anggota Madya, Anggota, Dewasa, Anggota Ahli, dan Anggota Purna (ART pasal 5). Masing-masing jenjang keanggotaan diangkat / dan diberhentikan oleh struktur partai pada tingkat yang berbeda-beda.

Menurut pasal 10 AD PKS, partai ini memiliki struktur di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan/wilayah yang setara dengan itu. Di tingkat pusat terdapat Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pimpinan Pusat, dan Dewan Syari'ah Pusat (ayat 1). Di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota terdapat Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah juga Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Syari'ah Daerah (ayat 2 dan 3). Sedangkan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan terdapat Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting. Selanjutnya, fungsi, tugas, dan wewenang Majelis Syura yang berganti setiap lima tahun diuraikan dalam pasal 11 AD PKS. Sebagai lembaga permusyawaratan partai, Majelis Syura memiliki otoritas yang luas dan besar, seperti menetapkan pimpinan lembaga-lembaga tinggi partai, AD/ART, platform, visi & misi, kebijakan, dan rencana strategis, serta calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung PKS.

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat merupakan lembaga tinggi partai yang berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura (AD pasal 12 ayat 1), dipimpin oleh Ketua Majelis Syura (ayat 2), beranggotakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Presiden Partai, Ketua Dewan Syari'ah Pusat, Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Pusat, dan

Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat (ayat 3). Salah satu kewenangan strategis yang dimiliki lembaga ini adalah membuat kebijakan partai dan merekomendasikan nama-nama calon yang akan diajukan sebagai calon anggota DPR-RI, dan Gubernur/Wakil Gubernur dari PKS (ayat 4).

Bab VII pasal 13 AD PKS mengatur Majelis Pertimbangan yang berada di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) memiliki tugas dan wewenang sebagai *think tank* yang merumuskan berbagai landasan dan kebijakan strategis partai, selain memutuskan berbagai ketentuan partai yang tumpang tindih. Bab VIII pasal 14 AD PKS mengatur Dewan Pengurus yang berada di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Sebagai partai kader, salah satu tugas utama Dewan Pengurus Pusat adalah melaksanakan dan mengontrol manhaj tarbiyah (sistem pembinaan dan pengkaderan partai). (pasal 14 ayat 3 huruf b)

Sebagai sebuah partai politik yang berazaskan Islam, Dewan Syariah menempati posisi yang strategis dalam struktur PKS, sebagaimana diatur dalam AD Bab IX pasal 15. Dewan Syari'ah juga terdapat di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di samping struktur Dewan Pimpinan di berbagai tingkatan, PKS juga memiliki Dewan Pakar, sebagai lembaga otonom yang berada di bawah MPP (ART pasal 67), dan Dewan Penasehat, sebagai lembaga otonom di tingkat cabang (kecamatan) dan ranting (desa/kelurahan). Anggota kedua lembaga tersebut bisa diisi oleh kader maupun bukan kader PKS.

2.1.5 Visi dan Misi PKS

2.1.5.1. Visi:

“Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa”.

Dari visi ini dapat dimengerti bahwa PKS berusaha untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa dalam bingkai keadilan dan kesejahteraan. Paradigma kebangsaan merupakan sebuah patron yang digunakan PKS dalam mencapai tujuan tersebut. PKS berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi politik, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai:

- a. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
- c. Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.
- d. Akselerator terwujudnya masyarakat madani di Indonesia. Maksudnya PKS berusaha mencapai tatanan masyarakat sipil sebagai pemegang kekuasaan. Tatanan masyarakat madani yang dimaksudkan di sini adalah merujuk pada tatanan masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad ketika melakukan hijrah di Madinah.

2.1.5.2. Misi:

- a. Menyebarluaskan dakwah Islamiyah, dan mencetak kader-kadernya menjadi *anashir taghyir* (agen perubahan).
- b. Mengembangkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
- c. Membangun opini publik yang Islami dan iklim yang kondusif untuk penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
- d. Membangun kesadaran politik masyarakat, advokasi, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraan.
- e. Amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
- f. Pro aktif melakukan komunikasi, sosialisasi (silaturahmi), kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wahdatul ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
- g. Berkontribusi positif dalam menegakan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negara-negara muslim tertindas.

Melihat visi-misi PKS dapat dikatakan bahwa secara normatif keduanya digunakan sebagai pedoman gerakan PKS. Visi sebagai pandangan PKS merupakan sebuah upaya untuk menjadikan partainya sebagai sebuah partai yang mempunyai kompetensi dalam bidang keadilan dan kesejahteraan. Sementara itu melihat misi yang ada, dapat dikatakan bahwa PKS mempunyai tujuan untuk peningkatan hal-hal yang bersifat “negatif” dan perlu pengembangan selanjutnya. Namun dari misi yang dituangkan, bahwa eksklusifitas misi

PKS sangat kental sekali. Terbukti dengan penggunaan bingkai Islam sebagai nafas gerakannya. Adapun aplikasi dari visi-misi tersebut dan proses perjalanan politiknya bersifat inklusif. Hal ini dapat dibuktikan dengan masuknya beberapa orang yang tidak beragama Islam untuk ikut berpartisipasi sebagai anggota aktif dalam PKS, walaupun jumlahnya tidak signifikan. (Abidin, 2003:101-103).

Sementara itu melihat misi PKS yang keempat dapat diketahui bahwa eksistensinya tetap berusaha memperjuangkan terhadap pemberdayaan masyarakat. Pembangunan kesadaran politik masyarakat, pembelaan dan pelayanan hak-hak kewarganegaraan yang dituangkan sebagai misi PKS dijadikan sebagai barometer untuk mengukur kontribusi PKS dalam pendidikan politik. Karena bagaimanapun juga kultur politik PKS tidak dapat dilepaskan dari pengamatan penulis terhadap aplikasi visi-misi tersebut.

2.2. Lahirnya PKS di Indonesia

Asal-usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an. Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (partai yang dibubarkan pada 1960) dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung. Di era reformasi, mantan tokoh Masyumi juga terlibat cukup jauh dengan turut serta meletakkan dasar-dasar pemikiran keagamaan islam dan ideologi politik PK/PKS sebagai partai dakwah. (Rahmat, 2011: v-vi)

Cikal bakal PKS berasal dari gerakan dakwah para mahasiswa dan mahasiswi di kampus-kampus luar negeri maupun tanah air. Perjalanan dakwah para aktivis kampus dikenal sebutan gerakan tarbiyah di Indonesia, mulai marak sejak tahun 1990-an.(Edward, 2006: xiii). Dengan suasana religius yang kental, penuh kidmad, jauh dari hangar binger layaknya deklarasi sebuah partai. Mengambil masjid sebagai basis operasionalnya melalui kampus-kampus, dimulai dari gerakan dakwah Islam yang dibangun secara sistematis dan mendetail oleh aktivitas-aktivitas muda Islam, itulah awal sejarah kelahiran partai ini.(Muhtadi, 2012)

Dari sinilah bermunculan *halaqah* atau kelompok-kelompok, forum-forum diskusi yang nantinya akan semakin meluas ke tataran masyarakat, yang tidak hanya membahas persoalan-persoalan agama saja, tetapi menyeluruh aspek kehidupan. Islam tidak hanya dipandang sebagai agama dengan ritualnya saja, setiap sendi kehidupan masuk didalamnya, sehingga mereka berpendapat, bahwa gerakan politik merupakan kelanjutan dakwah untuk seluruh proses panjang perbaikan umat.

Walaupun ada beberapa faksi di dalam tubuh LDK, tetapi semuanya sepakat membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada 1986. Kemudian pada pertemuan tahunan ke-10 FSLDK di Malang tahun 1998 mendeklarasikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. KAMMI muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal menyuarkan tuntutan reformasi melawan Soeharto yang dipimpin oleh Fahri Hamzah.

Searah pascamundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI telah mempertimbangkan berdirinya sebuah partai Islam. Partai tersebut kemudian diberi nama Partai Keadilan (PK). Kendatipun tokoh elite KAMMI memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, akan tetapi

KAMMI dan PK secara jelas dan tegas menyatakan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan formal. (Muhtadi, 2012).

Setelah sukses menjadi gerakan dakwah kampus dan di masyarakat, gerakan tarbiyah mulai mengenal jati dirinya dan mencoba mengadu nasib di kancah politik. Lahirlah Partai Keadilan (PK) pada 9 Agustus 1998 sebagai cikal bakal dari Partai Keadilan Sejahtera (berasimilasi jadi PKS pada 20 April 2002/9 Jumadil Ula 1423 Hijriyah). Pendiri PKS kebanyakan dari kalangan anak muda aktifis masjid kampus, sehingga wajar bila dikategorikan de dalam kelompok modernis. Namun bila diperhatikan lebih cermat, sejumlah pendiri PK jelas-jelas berakar dari kalangan tradisional.(Muhtadi,2012). Seperti, Salim Segaf al Jufri tercatat masih cucu pendiri Al Khairat yang cukup dominan di wilayah Indonesia bagian Timur, KH Rahmat Syafi'i tergolong murid KH. Abdullah Syafi'i (pendiri Asy Syafi'iyah dari Jakarta), Ahmad Heriawan adalah kader Persatuan Umat Islam (PUI), Daud Rasyid Sitorus berasal dari lingkungan Jamaah Al Washliyah di Sumatera Utara. Semuanya tercatat sebagai Dewan Pendiri PK. (Waluyo, 2005:30).

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. (Majelis Pertimbangan PKS, 2008:79). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya

(*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus mengubah namanya untuk dapat ikut kembali di pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). (Majelis Pertimbangan PKS,2008:81).

Didorong kuatnya keinginan untuk ikut berkontribusi bagi NKRI, pada 17 April 2003 musyawarah Majelis Syura XII Partai Keadilan merekomendasikan untuk bergabung dengan PKS. Tanggal 20 April 2003 dilakukan deklarasi Partai Keadilan Sejahtera di Silang Monas Jakarta, dihadiri 40.000 masa. DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkeham pada 4 Juni 2003, dan satu bulan kemudian PK resmi bergabung dengan PKS. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan beserta para kadernya. Dan, PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Pada awal berdirinya (1998) baru memiliki kader 42.202 orang, akan tetapi pada tahun 2004 perekrutan dan pertumbuhan kader yang dibangun selama lima tahun mencapai 394.190 orang. (Rahmat,2008: 80-81).

Pemilu 2004 PKS mendapatkan 8.325.020 suara. Jumlah kursi di D,PR-RI juga meningkat menjadi 45 kursi. Bahkan mantan presiden Dr. Hidayat Nurwahid terpilih sebagai ketua MPR RI, maka posisi Presiden PKS digantikan oleh Ir. Tifatul Sembiring sebagai bentuk budaya reformis: pejabat publik jangan jadi pemimpin parpol. Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di

Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. (*Media Indonesia*, 2005)

Tifatul Sembiring mengundurkan diri dari jabatannya ketika dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai Pjs Presiden PKS. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PKS periode 2010-2015. Kemudian setelah Luthfi Hasan Ishaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus impor daging sapi, maka pada tanggal 1 Februari 2013 posisinya digantikan oleh Anis Matta. Dan, pada tanggal 10 Agustus 2015 terpilih Presiden PKS masa bhakti 2015-2020 yaitu Dr. Sohibul Iman.

2.3. Paradigma Politik PKS

2.3.1. Konsep Pemerintahan

Formulasi konsep pemerintahan dalam pandangan PKS merujuk pada pemikiran Hasan Al Bana, dia adalah tokoh gerakan Al-Ikhwanul Al-Muslimin, yang ingin mengembalikan kekhalifahan Islam. Bagi Hasan Al Bana mengembalikan kekhalifahan menjadi sangat penting untuk mempersatukan dan melindungi umat Islam di seluruh dunia. PKS memandang bahwa *khilafah* adalah konsep tentang satu kekuasaan yang menyatu bagi seluruh wilayah-wilayah Islam dalam satu kekuasaan tertinggi dalam satu kendali. Tetapi mekanisme pengendalian yang dilakukan secara bersama-sama tergantung kepada format yang disesuaikan dengan situasi-situasi pada zaman setiap generasi.

Dengan demikian dalam konteks sekarang ini, bahwa perubahan bentuk negara sudah ditetapkan, maka konsep kekhalifahan itu mengalami perubahan pada formatnya secara substansial. Oleh karena itu, konsep khalifah cenderung lebih

mirip dengan konsep *the global state*. Sebab era negara bangsa (*nation state*) secara perlahan akan berakhir, jika melihat bentuk-bentuk negara seperti halnya pada abad pertengahan dari bentuk negara imperium, beralih ke negara bangsa, setelah Revolusi Perancis dan kemerdekaan Amerika sampai era globalisasi bentuknya sebenarnya sudah berubah lagi (Furkon,2004:248).

Hidayat Nur Wahid berpandangan bahwa kekhilafahan adalah sebuah aktivitas berpolitik di mana nilai-nilai Islam hadir dan peran dari politik Islam adalah memberdayakan umat serta hal yang ma'ruf bisa dimaksimalkan. Bentuk kekhilafahan itu hadir, kalau dilihat sejarah Khulafa Al-Rosyidin, Umayyah, Abasiah, Mamalik, apa yang pernah dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa mungkin saja yang tadinya khalifah bisa muncul menjadi kekhilafahan-kekhilafahan kecil atau lokal.

Ketika dikaitkan dengan zaman sekarang apakah nama kekhilafahan harus berwujud dengan nama khilafah, bukan negara republik atau kerajaan? Dan apakah republik pada sekarang ini bisa disebut *khilafah*? Terkait dengan hal ini, dalam pandangan Hidayat Nur Wahid apapun namanya republik atau kerajaan, kalau di situ terlaksana dengan baik, nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, keislaman, pemberdayaan, tidak terjadi praktek-praktek korupsi, penindasan, kezaliman, nepotisme, tirani dan kemudian terjadi mekanisme pergantian kepemimpinan yang Islami, bisa disebut kekhilafahan itu sendiri dalam konteks Indonesia yang sudah berbentuk republik, tidak perlu lagi diubah namanya jadi kekhilafahan. Untuk mendeskripsikan kekhilafahan itu seperti apa, Anis Matta dan Rahmat Abdullah sepakat kalau Amerika yang bagi peradaban Barat sekarang ini adalah khilafah. Amerika bisa jadi menggunakan sistem khalifah kalau sistem Islam seperti

keadilan, persamaan, persaudaraan, dan lain-lain terdapat pada bangsa Amerika. (Furkon,2004:249-250).

Oleh karena itu, konsep yang diberikan oleh dunia Barat itu mendapat kritik dari Hasan Al-Bana. Ia melihat propaganda Barat hanya pepesan kosong belaka. Sebagaimana ditegaskan bahwa pemerintahan diktator dan otoriter yang telah diterapkan di barat sudah sirna. Dalam pandangan Al-Ikhwan Al-Muslimin bahwa kekhalfahan adalah lambang persatuan Islam dan fenomena ikatan antar bangsa muslim. Khalifah adalah pijakan dalam pemberlakuan hukum Islam, karena para sahabat lebih mengedepankan urusan ini dari pada urusan pemakaman nabi hingga mereka menyelesaikan urusan ini dengan tuntas. Dengan kata lain al-Ikhwan al-Muslimin menjadikan pemikiran khalifah dan upaya untuk mengembalikan eksistensinya sebagai agenda utama dalam manhaj-nya. Meski demikian, al-Ikhwan al-Muslimin juga meyakini bahwa untuk mencapai khalifah membutuhkan banyak pengantar yang harus diwujudkan.

Dalam konsepsi kekhalfahan tampak jelas perbedaan antara pemikiran Hasan Al Bana dengan PKS. Dalam pandangan Hasan al-Bana mengembalikan kekhalfahan hukumnya adalah wajib. Mengapa Hasan al-Bana menginginkan tegaknya kembali khalifah Islamiyah? Karena Hasan al Bana pernah hidup pada masa kekhalfahan Usmaniyah dan ia melihat masih ada wibawa seorang khalifah untuk menjaga negara-negara Islam lainnya, terutama Mesir, dari tangan negara asing. Sementara dalam pandangan PKS lebih melihat fungsi dari kekhalfahan itu sendiri. Jika sebuah negeri mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dan mampu untuk membantu dan melindungi negara Islam lainnya maka negara tersebut sudah memerankan diri sebagai kekhalfahan, meskipun bentuk dan namanya republik atau kerajaan.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam pandangan PKS terkait dengan bentuk pemerintahan tergantung pada aplikasi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Frame penegakan keadilan dan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan yang ideal untuk menyatakan suatu negara tersebut "baik". Untuk itu dalam prakteknya PKS tidak mengambil pusing dengan nama republik sebagai dasar negara, melainkan melakukan aktualisasi nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai patron keberhasilannya. Pendek kata, PKS secara institusional menyikapi persoalan pemerintahan pendapatnya sama dengan Hidayat Nur Wahid selaku presidennya.

2.3.2. Konsep Negara

PKS adalah salah satu partai Islam yang lahir pada masa pasca reformasi. PKS baik pada visi, misi, manifesto maupun tujuannya yang termaktub dalam anggaran dasarnya tidak menyebutkan agama Islam sebagai dasar negara. Kendatipun PKS yakin bahwa Islam merupakan ide awal dan keyakinan, namun di Indonesia tidak harus didirikan negara Islam, melainkan negara yang dalam hal tertentu tidak dapat dilepaskan dari "nafas" Islam. Demikian juga persoalan penerapan syariat Islam sebagai hukum negara, bukan suatu yang harus dilaksanakan, namun minimal menjadi pertimbangan, mengingat negara Indonesia bukan bersifat homogen (negara Islam). Dan, setidaknya penegakan syariat Islam bukan menjadi dagangan politik yang harus selalu ditawarkan. (Furkon, 2004: 232).

Karakter utama dari partai Islam yang ada di Indonesia sekarang adalah tetap dipegangnya syariat Islam. Karena bagaimanapun partai Islam tanpa cita-cita ini akan kehilangan esensinya. Mengingat cita-cita pendirian negara Islam telah pudar di Indonesia, namun perjuangan yang mengarah pada penerapan syariat Islam menjadi pilihan partai politik Islam. Hal ini dilakukan dalam rangka mengikat *massa* (khususnya umat Islam) pada partai berasaskan Islam.

Misalnya saja, calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB), PBR (Partai Bintang Reformasi) dan partai Islam lainnya dalam kampanye akan berkomitmen memperjuangkan cita-cita ini secara nyata. Hal ini dilakukan selain dalam diri mereka terdapat keinginan untuk mengaplikasikan syari'at Islam, namun yang tersirat adalah bagaimana agar partai ini tidak keluar dari *image* keislamannya.

Nur Mahmudi Ismail menyatakan bahwa pemakaian azas Islam dalam berpartai hendaknya dipahami dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945. Sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengingatkan kepada setiap umat yang beragama, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Budha agar memiliki tanggung jawab *rabbaniyah*. Dengan demikian PKS dalam pandangannya memperjuangkan demokratisasi yang bertumpu kepada penghargaan terhadap kemajemukan. (Abidin,2003 90- 91) Munculnya partai Islam yang tidak bersemangat dalam kampanye syariat Islam secara formal, kemudian menjadi pertanyaan besar. Misalnya PKS yang dalam visi misinya menyebut klausul-klausul penerapan syariat Islam (lihat misi ke-3), namun secara formal aktualisasi dan penerapan syari'at Islam dalam PKS yang berhubungan dengan urusan negara (masyarakat secara totalitas) belum dilaksanakan.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah PKS tidak konsisten dalam memperjuangkan penerapan ajaran Islam sebagaimana dalam visi-misinya? Benarkah partai ini menggunakan politik pintu belakang dalam arti secara tidak *gentle* kemudian mengubah strategi politik menuju tuntutan Islam yang lebih formal apabila berkuasa? Tuntutan seperti itu bertolak belakang dengan *performance* PKS saat ini, PKS dianggap lebih mengusung isu-isu yang tidak berkaitan langsung dengan penerapan ajaran Islam. (Machmudi, 2005; 95-96).

Diketahui bahwa dua partai Islam yaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dan Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) dalam pandangan umum mereka bersikeras untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta dalam Batang Tubuh UUD 1945, khususnya pasal 29. Mereka menegaskan dengan ditambahkannya tujuh kata seperti dalam Piagam Jakarta itu tidak berarti akan terbentuknya negara Islam. Sementara itu, di saat yang sama, sebagian kelompok umat Islam di luar parlemen melakukan aksi turun ke jalan menuntut diberlakukannya syariat Islam. Di antara tuntutan itu adalah untuk memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta adalah formalisasi syariat Islam, perda syariat Islam, anti kemaksiatan, anti Kristenisasi, aksi solidaritas dunia Islam. (Salim, 2002)

Jadi, PKS mendukung kembalinya Piagam Jakarta terkait dengan amandemen pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Alasan yang dikemukakan PKS atas dukungannya ini terlihat dalam penjelasannya, PKS sebagai partai Islam dalam sejarahnya, PKS berembrio dari PUI, PSII-1905, dan PPI Masyumi yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Partai-partai Islam (FSPI), adalah partai yang memperjuangkan penghapusan azas tunggal Pancasila dan terbukti berhasil, sehingga sangat wajar jika PKS mempunyai komitmen untuk menegakkan agama Islam. (Republika, 2000). Jadi, PKS memposisikan dirinya sebagai partai Islam yang tetap menggunakan frame perjuangan keadilan dan kesejahteraan masyarakat berbingkai Islam. Karenanya sudah sangat jelas sikap PKS terhadap penegakan agama dan pengamalan syari'at Islam itu *rahmatan lil 'alamin* yang kemudian dirujuk pada pemahaman PKS terhadap Piagam Madinah sebagai acuannya.

Setiap partai Islam yang mendukung syariat Islam adalah hal yang wajar, dan sudah menjadi rahasia umum bagaimana memahami syariat Islam dan menerapkannya di Indonesia yang majemuk. Inilah yang membedakan tiap-tiap partai Islam.

Apakah syariat Islam dipahami sebagai paket legal formal yang harus dipaksakan di Indonesia adalah pertanyaan berikutnya, Dari permasalahan ini, ada beberapa hal yang penting untuk dikemukakan tentang isu syariat Islam dalam pandangan PKS. Hal ini bisa dibaca dari praksis politik dan literatur-literturnya. Poin-poin yang akan dipaparkan tidak mungkin bisa menggambarkan dengan persis, tetapi setidaknya bisa membantu dalam memformulasikan cita-cita politik PKS yang belum dipahami secara menyeluruh oleh kelompok yang lain.

Konsekuensi dari pemahaman Islam yang menyeluruh adalah munculnya sikap dan keyakinan bahwa semua aspek kehidupan bernilai ibadah tidak ada lagi batasan-batasan yang jelas, mana perbuatan-perbuatan yang semata-mata bernilai dalam wilayah agama dan mana yang di luar. Lebih lanjut lagi, aspek-aspek lain dalam kehidupan yang selama ini dipandang sebagai aktivitas sekuler tidak lagi demikian dalam pandangan PKS. Kampanye anti korupsi mendorong pemerintahan yang bersih dan aksi-aksi sosial yang lain merupakan manifestasi dari pengamalan Islam. Tentunya praktik-praktik semacam itu dipahami sebagai bagian dari syariat Islam yang diperlukan implementasinya. Memang aspek semacam itu terulas dalam warisan-warisan Islam klasik dan tidak menarik untuk diekspos dalam tataran sosial politik yang lebih luas.

Pemahaman yang lebih komprehensif menurut pandangan gerakan tarbiyah tentang syariah Islam yang berwawasan kesejahteraan tampaknya perlu segera diformulasikan agar dipahami oleh masyarakat Indonesia. Isu ini menjadi krusial mengingat praktik-praktik politik yang dijalankan oleh rezim-rezim yang berkuasa di negara-negara Islam, setiap kali menampilkan gambaran yang tidak menggembirakan. Penerapan syariat Islam di beberapa negara itu sering dibarengi dengan kondisi ekonomi rakyat yang sangat memprihatinkan. Begitu mereka mampu menyelesaikan persoalan politik umat Islam

secara top-down, persoalan ekonomi dan sosial rakyat justru tidak mendapatkan prioritas. Akibatnya, gambaran yang muncul tentang negara-negara yang menerapkan syariat Islam adalah negara miskin. (Machmudi, 2005: 98-99).

Menurut Hidayat Nurwahid, kata-kata negara Islam bukan satu hal yang diutamakan. Pada masa pemerintahan Rasulullah atau Khulafa al-Rasidin, Dinasti Umayyah dan Abbasyiah juga tidak menyebut negara Islam. Tetapi yang dipentingkan adalah bagaimana nilai-nilai itu hadir dalam kaidah kehidupan dan kemudian publik mengarahkan potensinya agar tidak melakukan kezaliman pada apapun dan siapapun dan tidak menghabiskan waktu dengan perdebatan yang tidak berkunjung habisnya. (Furkon, 2005: 234). Didirikannya PKS dengan tujuan yang sangat jelas sebagaimana yang terdapat dalam anggaran dasar PKS yang berbunyi: “PKS adalah Partai Dakwah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridloi Allah Subhanahu Wata'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”. Dengan kata lain PKS ingin menciptakan keadilan dan kesejahteraan dengan bingkai Pancasila, bukan negara Islam. (AD/ART PKS Bab II).

Menurut Anis Matta, tidak penting menangkap wacana negara Islam atau bukan negara Islam, karena agama ini milik umat Islam. Sejak awal kita sudah mengidentifikasi diri kalau kita bukan orang luar di negri ini, tetapi bagian dari negri ini. Dulu orang mengelola negara ini dengan sekuler, sekarang kita ingin mengelola negara ini dengan cara Islami itulah inti dari pemahaman terhadap Islam dan negara. Oleh karena itu, PKS menurut Anis Matta tidak pernah mengusung negara Islam atau syariat Islam, tetapi yang dibangun adalah bagaimana menghadirkan Islam pada seluruh sektor kehidupan. Misalnya bagaimana mengelola sistem pendidikan dengan cara Islami, bagaimana mengelola sistem pertahanan dengan Islami,

bagaimana mengelola sistem perekonomian dengan Islami. (Furkon, 2005: 235).

Dari elaborasi tersebut dapat diketahui kerangka pikir dan anggaran dasar PKS sudah jelas bahwa keberadaannya ingin menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. NKRI dijadikan sebagai wadah untuk perjuangannya, sementara Islam merupakan nilai-nilai yang dikembangkan untuk diimplementasikan. Kendatipun begitu perjuangan PKS belum sampai pada titik akhir, sehingga upaya untuk merealisasikan hal tersebut menjadi proses yang masih membutuhkan kesungguhannya. Dari sisi inilah yang kiranya memunculkan *image* PKS dipandang belum memperjuangkan ajaran Islam, karena masih berhadapan dengan agenda politik yang sifatnya struktural.

2.3.3. Konsep Kepemimpinan

Konsep tentang kepemimpinan dalam PKS, sudah dirumuskan dalam mekanisme Majelis Syura. Penentuan keanggotaan Majelis Syura, PKS mengajukan persyaratan sebagai berikut: Usia tidak kurang dari 30 tahun, telah menjadi anggota kader inti dengan status anggota ahli partai, melaksanakan asas dan tujuan partai, komitmen dengan kewajiban-kewajiban anggota, berkelakuan baik dan tidak mendapatkan sanksi dalam 3 tahun terakhir, berwawasan syar'i, bersifat amanah dan berwibawa.

Selain syarat tersebut, dalam menentukan Majelis Syura, PKS juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Moralitas, faktor ini menjadi penting dan menjadi hal utama yang menjadi pertimbangan partai. Untuk mengukur moralitas seseorang, PKS akan mendasarkan penilaian pada *track record* seseorang sebelum mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau kepala negara sekalipun. Misalnya, apakah sebelum mencalonkan diri terlibat skandal moralitas atau tidak, terlibat korupsi atau tidak dan sebagainya.

2. Kapabilitas, hal ini menjadi faktor yang dipertimbangkan sebagai garansi bahwa orang itu mampu atau tidak, baik atau tidak, berkualitas atau tidak dan sebagainya.
3. Kapasitas, hal ini sangat penting sebagai cara menterjemahkan moralitasnya pada masyarakat, mampu berkomunikasi, mengambil keputusan, mengakomodasi masyarakat yang beragam, faktor etika menjadi penting sehingga dapat diterima masyarakat.
4. Akseptabilitas, artinya sejauh mana kandidat tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Banyak orang yang bermoral tapi tidak diterima masyarakat, terkadang kapasitasnya ada tapi moralitasnya tidak ada. Bukan karena ia tidak diterima masyarakat tetapi karena ia tidak populer, ini penting karena aktivitas pilkada itu mau gak mau salah satunya berdasarkan popularitas.

Beberapa hal tersebut di atas merupakan upaya yang dilakukan PKS dalam menyiasati institusinya agar dapat bersaing dengan yang lain, disamping sebagai budaya politik yang dikembangkan. Nilai-nilai yang dituangkan tersebut merupakan perwujudan dari komitmen bersama untuk menciptakan sistem yang betul-betul baik dan dipertanggung jawabkan.

Euforia pilkada yang seperti ini disikapi sebagai salah satu persoalan yang dituntut untuk dicari format yang ideal. Perhelatan PKS dengan kondisi umum pada persoalan pilkada menciptakan karakteristik tersendiri dalam diri PKS. Inilah yang membedakan PKS dengan partai politik lainnya. Sebagai tambahan diketahui bahwa PKS telah "memenangkan" 10 dari 22 Pilkada di Jawa Tengah. Artinya bahwa PKS mendapatkan ruang pada masyarakat Jawa Tengah. Persoalan ruang yang didapat karena faktor kultur politik atau hal lain menjadi penting untuk diadakan penelitian kembali. (Departemen Politik & Hukum PKS Jateng, 2003).

Sementara itu secara internal partai, PKS mencanangkan berbagai aturan main tentang mekanisme pencalonan calon kepala daerah dari partainya. Majelis Syura akan memilih calon kepala daerah dari PKS. Jika ada anggota Majelis Syura berhalangan tetap, maka majelis berhak mengangkat dan mensahkan penggantinya. Anggota Majelis Syura terpilih, harus mengucapkan janji setianya di hadapan Musyawarah Nasional, dengan bunyi sebagai berikut:

“Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk berpegang teguh. pada syari'at Islam dan untuk berjihad di jalan-Nya, menunaikan syarat-syarat keanggotaan Majelis Syura PKS Sejahtera, melaksanakan tugas-tugas darinya dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpinnya dalam keadaan lapang maupun sempit –selain untuk maksiat– sekuat tenaga melaksanakannya. Dan saya bersumpah kepada Pengurus Majelis Syura untuk itu, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan”.

Dalam Pasal 7 Tugas Majelis Syura: Memilih dan menetapkan Ketua Majelis, Wakilnya dan Sekretaris Majelis dan menetapkannya sebagai ketua, wakil dan sekretaris Majelis Pertimbangan Partai, Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Partai, Memilih, dan menetapkan Ketua, Wakil dan Anggota Dewan Syari'ah Pusat, Memilih, dan menetapkan Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum serta beberapa orang Anggota Dewan Pimpinan Pusat, menyusun tujuan-tujuan partai, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Nasional., Menetapkan klausul-klausul perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) (Sebagaimana pasal 13, pada “Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera”) dan kebijakan politik. Menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dari laporan keuangan. Menetapkan rencana kerja periodik partai, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaannya. Mengambil sikap tegas dan bijak dalam hal

pencemaran nama baik, kritik, pengaduan, dan tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan partai.

Anggota Majelis Syura terdiri dari sekurang-kurangnya tiga puluh lima orang yang dipilih melalui pemilihan raya yang melibatkan seluruh anggota kader inti partai. Pemilihan anggota Majelis Syura dilakukan melalui pemilihan raya yang penyelenggaraannya dengan membentuk kepanitiaan oleh Majelis Syura yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Seorang ketua berasal dari anggota Majelis Syura. Seorang wakil ketua berasal dari anggota Dewan Syari'ah Pusat. Seorang sekretaris berasal dari Dewan Pimpinan Pusat. Dan beberapa orang anggota. Pengesahan dan pelantikan anggota Majelis Syura terpilih dilakukan oleh Musyawarah Nasional sebagaimana yang terdapat dalam pasal 12 dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera. Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, pada pasal 19.

Majelis Pertimbangan Partai sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 terdiri dari sebanyak-banyaknya sepertiga anggota Majelis Syura yang dipilih oleh Majelis Syura dari anggotanya. Majelis Pertimbangan Partai (MPP) bertugas menjabarkan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syura. Selain itu MPP bertugas Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syura. MPP juga memiliki kewenangan untuk menentukan sikap Partai terhadap permasalahan-permasalahan umum dan perubahan-perubahan politik secara regional, dunia Islam atau internasional bersama Dewan Pimpinan Pusat. Mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Sidang-Sidang Majelis Syura.

Selain itu MPP bertugas merekomendasikan kebijakan program pemilihan umum dan melegalisir calon-calon partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas lain MPP adalah menunjuk perwakilan (wakil) partai pada lembaga-lembaga, organisasi dan kongres-kongres di

dalam dan luar negeri bersama Dewan Pimpinan Pusat. Dan, tak kalah pentingnya, tugas MPP adalah terlibat dalam proses ratifikasi langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan program kerja politik (strategis). MPP juga bertugas mengambil tindakan tegas dalam hal fitnah, kritik, aduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan partai dan anggotanya dan yang terakhir Majelis berhak membentuk komisi ad-hoc yang terdiri dari unsur anggota Majelis Syura dan pakar-pakar sesuai dengan bidangnya. (Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera).

Melihat mekanisme yang ada dengan demikian dapat dimengerti dan dipahami bahwa peran penting Majelis Syura dalam PKS menentukan kinerja partai. Upaya untuk menciptakan budaya politik yang dapat mewadahi sifat dan sikap yang lebih baik tersebut, setidaknya memberikan image positif bagi perkembangan budaya politik di PKS. Dalam konteks ini, PKS telah berhasil membawa para kadernya menuju puncak-puncak kepemimpinan baik di Lembaga Negara, MPR, DPR, maupun Kepala Daerah.

Di antara beberapa kader PKS yang fenomenal dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Kader-Kader Fenomenal PKS

No.	Nama	Jabatan
1.	Nur Mahmudi Ismail	Presiden PKS:1998-2000 Menteri Kehutanan:1999-2000 Walikota Depok: 2005-2010, 2010-2015
2.	Hidayat Nur Wahid	Presiden PKS: 2000-2005 Ketua M P R-RI: 2004-2009 Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera: 2009-2014 Wakil Ketua M P R-RI: 2014-sekarang

3.	Tifatul Sembiring	Presiden PKS: 2005-2009 Menteri Komunikasi dan Informatika: 2009-2014
4.	Luthfi Hassan Ishaq	Presiden PKS: 2009-2013 (Mengundurkan diri karena kasus impor daging sapi)
5.	Anis Matta	Presiden PKS; 2013-2015 Wakil Ketua DPR: 2009-2013
6.	M. Sohibul Iman	Presiden PKS: 2015-2020 Wakil Ketua DPR: 2013-2014
7.	Adhyaksa Dault	Menpora Olahraga: 2004-2009
8.	M. Yusuf Asy'ari	Menpera: 2004-2009
9.	Fahri Hamzah	Wakil Ketua DPR: 2014-sekarang
10.	Salim Segaf Al-Jufri	Menteri Sosial: 2009-2014
11.	Suswono	Menteri Suswono: 2009-2014
12.	Suharna Surapranata	MenRiset & Teknologi: 2009-2011
13.	Ahmad Heryawan	Gubernur Jawa Barat: 2008-2013, 2013-2015
14.	Abdul Ghani Kasuba	Gubernur Maluku Utara: 2014-2019
15.	Gatot Pujo Nugroho	Gubernur Sumatera Utara: 2011- 2013, 2013-2018
16.	Irwan Prayitno	Gubernur Sumatera Barat: 2010- 2015
17.	Anton Apriantono	Menteri Pertanian: 2004-2009

Sumber: Dokumentasi DPP PKS, 2014

2.4. Budaya Politik

Budaya politik merupakan dua kata yang mempunyai makna berbeda, namun apabila digabungkan akan memiliki makna yang bersatu dan saling melengkapi maknanya. Terminologi “budaya politik” berasal dari kata "budaya" dan "politik". "Budaya" seringkali didefinisikan sebagai hasil karya dan karsa manusia. Definisi tentang budaya banyak diungkap oleh para ahli sosiologi dan sejarah (ilmu sosial). Budaya merupakan hasil karya atau ciptaan manusia, dimana keberadaannya bersifat tentatif dan temporal (tidak kekal). Hal ini jelas memberikan kesan bahwa keberadaannya berbeda dengan ciptaan Tuhan yang sifatnya kekal, seperti penciptaan alam, manusia dan sebagainya.

Kata "budaya" menurut Ariel Haryanto sebagai sistem pemaknaan terhadap segala sesuatu yang dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk ideologi, tingkah laku dan hasil karya manusia. (Koentjaraningrat, 2002:51). Menurut penulis, definisi ini yang sesuai dengan kata setelahnya (politik) untuk kemudian mendefinisikan tentang "budaya politik".

Kata "politik" juga dapat didekati dengan berbagai definisi. "Politik" dalam kata benda biasa didefinisikan sebagai;

(1) keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan menurut mana suatu negara, daerah dan seterusnya diperintah atau harus diperintah, (2) tindak tanduk, garis kelakuan dari suatu pemerintahan, (3) cara bertindak, berlaku, taktik.

Sementara itu "politik" menurut Miriam Budiardjo adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan. (Budiardjo, 1993:8). Proses yang dimaksud dalam sebuah terminologi politik ini lebih ditekankan pada persoalan masyarakat secara luas dan bukan secara pribadi.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa persoalan politik didekati dengan pendekatan yang bersifat lebih kompleks dan didalamnya terdapat kumpulan orang banyak. Penekanan inilah yang membedakan antara kata "politik" dan "strategi". Strategi sebagaimana dipahami merupakan proses bagaimana seseorang atau kumpulan orang untuk mencapai sesuatu tujuan. Perbedaan antara politik dengan strategi lebih pada subyek atau pelaku kata tersebut, sementara aplikasinya memiliki persamaan untuk "memenangkan" sesuatu. Namun kalau boleh dibilang makna kedua terminologi tersebut sangat tipis perbedaannya.

Teori tentang kultur politik merupakan salah satu bentuk teori yang dikembangkan dalam kerangka memahami sistem politik. Munculnya terminologi budaya politik tidak dapat dilepaskan dari pencetus sistem politik, yaitu David Easton yang kemudian dikembangkan oleh Gabriel A. Almond (1950-1970), yang kemudian bersama rekannya Sidney Verba mengembangkan teori kebudayaan politik, yang dirangkum dalam karyanya *The Civic Culture*. (Lijphart, 1968: 2-5)

Keberadaan tokoh tersebut di atas sebagai pioneer tentang sistem politik kemudian berusaha mengungkap praktek sistem politik yang berlaku. Lambat laun dalam melihat kerangka sistem politik tersebut para tokoh tad⁴ melihat sebuah kenyataan munculnya budaya politik dalam sebuah sistem politik. Pada perkembangan berikutnya mau tidak mau mereka harus mengkritisi perkembangan tersebut.

Budaya politik menurut Albert Widjaya (1988) identik dengan ideologi, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai. (Widjaya, 1982: 3). Persamaan antara budaya politik dan ideologi di sini dikarenakan ideologi dipakai sebagai cerminan pandangan hidup atau sikap mental. Adapun dalam artian yang lebih sempit, ideologi merupakan perangkat

pandangan serta sikap-sikap dan nilai-nilai, atau suatu orientasi berpikir tentang manusia dan masyarakat. (Adorno,1950:.45).

Lebih lanjut Widjaja mengungkapkan bahwa budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan yang mempunyai ciri khas tertentu dalam masyarakat. Budaya politik meliputi persoalan legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai politik, perilaku aparatur pemerintah serta gejala masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Yang dapat dicatat disini bahwa budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan masyarakat yang tiap-tiap anggotanya mempunyai budaya yang sama dan seragam. Dengan demikian budaya politik tidak hanya dipahami sebagai realitas nilai pemenuhan kekuasaan dan sebagainya melainkan mencakup aspek yang lebih luas, seperti keagamaan, sosial, ekonomi dan seterusnya.

Menurut Gaffar, budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap obyek sosial, dimana dalam hal ini sistem politik mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat afektif, kognitif dan evaluatif. Orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki masing-masing individu terhadap sistem politik. Sementara itu orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, ibukota negara, mata uang yang dipakai dan sebagainya. Orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan peranan individu di dalamnya. (Affan Gafar, 2000:99).

Interaksi yang ada antara sub-budaya politik dengan pelaku politik akan mengantarkan pada sebuah terminologi

yang dinamakan sebagai kematangan budaya politik. Sementara itu kematangan budaya politik merupakan suatu prakondisi, dimana budaya politik masyarakat berada dalam satu tahap perkembangan, sehingga berfungsi dengan baik. Adapun untuk melihat berfungsinya budaya politik dapat dilihat melalui keserasian antara kebudayaan bangsa dengan struktur politiknya.

Keserasian dan keselarasan yang ada menimbulkan hal-hal yang melingkupi budaya politik. Budaya politik akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan pematangan tersebut. Semakin jelas kiranya bahwa budaya politik merupakan sebuah patron politik yang dapat dikembangkan dengan berbagai usaha yang dilakukan, sehingga evaluasi terhadap eksistensi sebuah budaya politik mutlak dibutuhkan. (Almond dan Sidney,1993:13).

Proses pendidikan atau sosialisasi politik di dalam masyarakat akan menghasilkan kultur politik. Individu atau kelompok masyarakat akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya atau dari para elite politik yang dilaksanakan lewat bermacam-macam agen seperti; keluarga, teman, dan media massa. (Suwondo, 2000:5)

Definisi ini mempersitkan asumsi bahwa budaya politik membutuhkan proses yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan media dalam komunikasi sebagai perangkat dalam menciptakan budaya politik. Model komunikasi efektif merupakan sebuah prasyarat yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menciptakan budaya tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh para elite politik dalam bersosialisasi kepada arus bawah akan memberikan dampak yang berkepanjangan, sehingga lambat laun atau pada saatnya terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap elite politik sebagai fasilitator, dinamisator

perjalanan politik. Dengan demikian dibutuhkan beberapa variabel pendukung untuk menciptakan sinergi dalam menciptakan budaya politik yang "baik" dan "sukses".

Paling tidak ada enam variabel budaya politik yang dijadikan sebagai landasan evaluasi perkembangan budaya politik menurut Widjaya; 1) Orientasi nilai-nilai (pragmatis atau utopis), 2) Sikap terhadap tradisi dan perubahan (Struktur pemikiran yang akomodatif atau absolut), 3) Tingkat militansi (toleran atau militan), 4) Pola kepemimpinan (kepemimpinan yang mendorong aktivisme atau yang menuntut kepatuhan), 5) Sikap terhadap mobilitas (mendukung mobilitas atau memelihara status quo), 6) Prioritas kebijakan (berorientasi ekonomi atau non ekonomi).(Widjaja, 1982:18).

Sementara itu budaya politik terbagi menjadi tiga, yaitu *pertama*, kebudayaan politik parokial, yaitu adanya masyarakat yang terlibat dalam sebuah budaya politik yang orientasinya masih bersifat parokial (dalam lingkup yang masih sempit). *Kedua*, kebudayaan politik subyek, yaitu adanya orientasi yang lebih tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif. Budaya politik pada pembagian ini bersifat subyektif dan tidak ada orientasi subyek dalam pengembangan pranata penyelenggaraan politik suatu negara. *Ketiga*, kebudayaan politik partisipan, merupakan suatu bentuk kultur, dimana anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara keseluruhan, juga terhadap Struktur dan proses administrasi politik. (Almond, dan Verba, 1993:20-23).

Ketiga klasifikasi di atas merupakan pandangan yang variatif dalam masyarakat mengenai pensikapannya terhadap budaya politik. Masing-masing mempunyai sisi minus-plusnya. Namun disadari atau tidak kebudayaan subyektif dirasa lebih dapat diterima sebagai sebuah ide untuk pengembangan budaya politik ke arah yang lebih

menjanjikan. Sementara itu kebudayaan partisipatif lebih banyak mengarah pada partisipasi masyarakat saja, tanpa memberikan kontribusi positif dalam perjalanan eksistensinya.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa penelitian ini dalam tahapan teori mengacu pada konsep yang telah dituangkan oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. Budaya politik dimengerti sebagai perubahan sikap masyarakat dalam sistem politik tertentu. Sementara itu dalam tahapan operasional tentang kontribusi partai politik dalam pendidikan politik, dirasa konsep Suwondo yang merujuk pada Afan Gaffar kiranya sangat relevan digunakan pada penelitian ini.

Singkatnya budaya politik yang digunakan sebagai realisasi dari penelitian ini adalah perubahan aktualisasi sikap dan PKS dalam menghadapi sistem politik dan muncul berdasarkan sosialisasi politik PKS. Sikap dan perilaku politik PKS merupakan sesuatu yang dikaji dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan atau dipahami sebagai sebuah penguatan asumsi bahwa budaya merupakan suatu perilaku yang berubah seiring dengan perubahan kondisi dan situasi masyarakat.

2.5.Munculnya Budaya Politik

Melihat definisi di tersebut atas, munculnya budaya politik tetap mengacu pada sosialisasi politik. Sosialisasi di sini dimaksudkan sebagai proses penerusan atau pewarisan nilai dari satu generasi ke generasi selanjutnya atau dari kalangan elite politik kepada rakyat biasa. Adapun yang dibawa dalam budaya politik adalah kerangka dasar pergerakan, ideologi politik, dan hal-hal yang menyangkut persoalan politik. (Suwondo, 2000: 6).

Proses sosialisasi di atas merupakan standar yang terpenting dalam melihat budaya politik yang dihasilkan. Kesalahan dalam sosialisasi akan memunculkan kesalahan

transfer of political statement dan sejenisnya. Padahal disadari atau tidak budaya politik mempunyai perubahan seiring dengan perkembangan situasi politik dalam suatu negara atau pemerintahan.

Namun di sisi lain, apabila budaya politik lebih dipahami sebagai sebuah proses alamiah dan infrastruktur politik maka hal ini tidak berarti bahwa pertumbuhan budaya politik tidak mengandung campur tangan atau pengaruh manusia. Sebaliknya budaya politik dan kondisi yang diciptakan merupakan warisan yang harus diterima oleh tiap generasi sebagai "pemberian alam" atau *natural endowment*, sehingga budaya politik sulit untuk berubah, kecuali aspek pinggirnya saja. Perubahan yang besar dalam budaya politik dapat terjadi apabila terdapat suatu peristiwa yang memang bertujuan merombak norma-norma yang ada dan benar-benar menyentuh dasar-dasar kehidupan rakyat banyak. (Widjaja, 1982:32-33)

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, dimana anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Sekilas memahami definisi di atas dapat diketahui bahwa partai politik berorientasi pada kekuasaan negara. Pemenangan tujuan untuk kekuasaan yang menjadi target partai politik inilah yang dikedepankan partai politik.

Definisi partai politik di atas merupakan pendapat Budiardjo yang menurut penulis banyak terinspirasi oleh pendapat tokoh-tokoh politik terkemuka, seperti: Carl J. Friedrich; "partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpinpartainya, dan berdasarkan penguasaan ini

memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materii”. Pendapat lain yang memberi inspirasi kepadanya, R.H. Soltau, “Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”. (Budiardjo, 1993:160-161).

Tujuan kekuasaan yang menjadi target atau tujuan sebuah partai politik harus diimbangi dengan orientasi positif sebuah partai politik. Tanpa orientasi yang diwujudkan dalam visi, misi dan orientasi positif sebuah partai politik berimplikasi pada arogansi sebuah partai politik dalam menjalankan roda kekuasaan. Dengan demikian partisipasi politik massa pendukung sebuah partai politik menjadi besar posisinya dalam rangka kemenangan partai politik dalam mencapai kekuasaan. Partisipasi politik menjadi syarat mutlak kemenangan di atas, selain sebagai sebuah kontribusi partai dalam penyaluran aspirasi politik masyarakat. Pendeknya, partisipasi politik penting sebagai sarana orientasi sebuah partai politik menuju pelaksanaan pemerintahan yang baik dan keberadaannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara totalitas dan signifikan.

Namun perlu dipahami juga bahwa suatu partai politik memiliki visi dan misi tersendiri sebagai ajang pemenuhan hajat partai. Visi dan misi partai politik dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu sisi kebangsaan, artinya partai politik ini adalah partai politik yang sifatnya umum dan bergerak sesuai dengan amanat masyarakat makro. Partai politik ini biasa disebut dengan partai nasionalis. Adapun yang satunya disebut dengan partai agama. Artinya agama dijadikan sebagai orientasi moral dan seringkali komposisi anggotanya (hanya mempunyai satu ideologi agama (mono agama). Dalam partai yang seperti ini biasanya agama dijadikan sebagai inspirasi

moral dalam menata kehidupan politik. (Lekitoo, 2000: 23-39).

Namun seringkali agama dijadikan sebagai simbol dalam upaya rekrutmen massa partai. Dan inilah yang seringkali dijadikan sebagai acuan partai, sehingga kalau boleh dibilang agama dijadikan sebagai tameng atau pertahanan eksistensi partai politik. Kalau sudah seperti ini kondisinya, maka dapat dikatakan telah terjadi manipulasi terhadap tujuan agama yang digunakan sebagai ajang kepentingan politik.

Lebih lanjut bahwa “partai politik agama” latar belakang munculnya terbagi menjadi tiga hal, *pertama*, agama memiliki dukungan teologis untuk mencapai cita-cita berdasarkan gagasan keagamaan yang dipercaya, *kedua*, ikatan politik dari warga negara menyebabkan agama sebagai faktor pengikat untuk mendukung pemimpin dari kelompok agama tersebut, *ketiga*, umat salah satu agama lebih nyaman dengan pemimpin politik yang lahir dari komunitasnya sendiri, dan tidak percaya manakala politik dikuasai oleh golongan agama lain. (Sumartana,1999:101)

Ternyata sentimentil kepercayaan dan agama seringkali menjadi penghambat dalam upaya kesepahaman politik. Memang dalam dunia politik standar kebaikan tidak terletak pada kesamaan persepsi dalam pendapat. Namun terkadang kesamaan tekad dan pendapat dalam melihat masalah pemerintahan menjadi penting adanya. Konflik politik harus terselesaikan terlebih dahulu dalam kerangka kepentingan bersama. Dengan demikian unsur budaya politik yang baik dapat direalisasikan dengan tidak adanya konflik antar partai politik yang berbeda.

Adapun budaya politik yang terdapat dalam sebuah partai politik sifatnya alamiah. Maksudnya secara otomatis perilaku para elite politik menjadi prasyarat dalam

pembentukan budaya politik. Perilaku elite politik dalam berkiprah di organisasi politiknya, yang terangkum dalam partai politik mestinya memiliki nilai budaya yang berbeda antara satu partai politik dan lainnya. Eksistensi para elite politik ditentukan sejauh mana dirinya mampu mempertahankan posisi dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Daya tahan seorang elite politik tidak hanya sebatas bagaimana mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang senantiasa berubah, tetapi juga sejauh mana mereka mampu mempertahankan dan mengembangkan pengaruhnya. (Bottomore,2006: v).

Perbedaan budaya politik yang ada merupakan standar sebuah partai politik. Maksudnya, budaya politik dalam sebuah partai politik mempunyai sisi menarik untuk dijadikan simbol penarik massa. Massa akan melihat budaya tersebut sebagai sisi pilihan yang dapat dipilih ataupun tidak. Semakin baik budaya politik yang muncul dalam sebuah partai politik, semakin besar pula animo masyarakat untuk mengikutsertakan dirinya di dalamnya.

2.6. Sistem Rekrutmen

PKS menggunakan dua strategi dalam merekrut kader. *Pertama* adalah pola rekrutmen individual (*al-da'wah al-fardhiyyah*), atau bentuk pendekatan *persuasif* orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti *usrah* (keluarga), *halaqah* (kelompok studi), *liqa* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (perkemahan), *daurah* (pelatihan intelektual) dan *nadwah* (seminar). Sistem yang digunakan PKS ini mirip dengan sistem rekrutmen gerakan Islamis di Mesir. *Kedua* adalah pola rekrutmen institusional (*al-da'wah al'amma*). PKS berafiliasi dengan

berbagai organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal, sehingga partai dapat memanfaatkan institusi-institusi ini untuk meraup kader potensial. Kedua cara rekrutmen tersebut menandakan bahwa PKS adalah partai terbuka, karena PKS tidak merekrut anggotanya dari sistem *fardhi* saja akan tetapi juga lewat sistem *jama'i / al-da'wah al'amma*.

2.6.1. Rekrutmen Fardhi

Rekrutmen *fardi* yaitu rekrutmen yang dilakukan oleh anggota Tarbiyah terhadap satu atau dua orang dengan pendekatan pribadi atas inisiatif sendiri atau atau atas rekomendasi seorang murabbi. Rekrutmen ini dilakukan dengan cara seseorang anggota Tarbiyah mencari calon peserta Tarbiyah, calon tersebut kemudian dikondisikan melalui tahapan, antara lain: *ta'aruf* dan *taqarrub*. Hasil dari upaya pemantauan ini kemudian dilaporkan, dibicarakan, dan dianalisis dalam forum *halaqah* berdasarkan standar syarat syarat peserta Tarbiyah. Jika memenuhi syarat maka ia akan diarahkan untuk mengikuti *halaqah* Tarbiyah. (Rahmat, 2008: 278).

2.6.2. Rekrutmen Jama'i

Rekrutmen *jama'i* yakni rekrutmen yang dilakukan kolektif secara formal dan informal. Rekrutmen jenis ini memiliki beberapa pola:

- 1) Rekrutmen kepartaian, yakni rekrutmen terhadap anggota masyarakat melalui kegiatan formal kepartaian untuk menjadi anggota dan simpatisan partai. Kegiatan ini dilakukan melalui, pertama, Training Orientasi Partai 1 (TOP 1). Dari TOP 1 akan dihasilkan beberapa tingkatan calon kader, antara lain: yang memiliki kualifikasi tertinggi akan menjadi anggota pemula terbina. Kelompok inilah yang akan dibina dengan intensif di “kawah candradimuka” yang disebut *halaqoh tarbiyah*, seperti yang di tempuh

di LDK. Kualifikasi kedua akan menjadi calon anggota pemula terdaftar yang hanya boleh mengikuti Ta'lim Rutin Partai (TRP). Sedangkan kualifikasi terendah akan menjadi calon anggota partai yang hanya menerima KTA, yang berfungsi menambah dukungan dan suara bagi partai. Kedua, Training Orientasi Partai II (TOP II). TOP II berfungsi meningkatkan peserta TRP dan yang menerima KTA untuk bisa menjadi Anggota Pemula Terbina atau halaqoh Tarbiyah level pemula.

- 2) Rekrutmen melalui pendaftaran peserta. Pendaftaran peserta ini bisa dilakukan di sekretariat tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, hingga DPRa, di rumah rumah kader PKS atau melalui website. Para peserta yang mendaftar juga akan ditraining melalui TOP 1, TOP 2, dan diupayakan bisa mengikuti Tarbiyah anggota level pemula.
- 3) Rekrutmen melalui Lembaga Dakwah Sekolah dan Lembaga Dakwah Kampus. Hasil dari rekrutmen ini juga diarahkan untuk mengikuti Tarbiyah anggota pemula.
- 4) Rekrutmen bisa juga melalui berbagai kegiatan yang lain, seperti majelis ta'lim, studi intensif, kegiatan Ramadhan, pelatihan, baksos, santunan, dan kegiatan keegiatan yang lain. semua jenis rekrutmen ini berorientasi sebagai pintu masuk untuk menjadi peserta Tarbiyah level pemula. (Rahmat, 2008: 279).

PKS juga menjaring non Muslim masuk ke dalam partai melalui anggota kehormatan. (Takariawan, 2003:126). Penjaringan anggota dari non Muslim merupakan strategi pengembangan PKS untuk menaikkan pamor PKS yang terbuka terhadap pluralisme, sehingga PKS dapat memperluas basis sosialnya dalam kontestasi pemilu. PKS memang partai kader

tapi juga menginginkan massa yang banyak. Karena dengan memiliki kader yang solid, militan, dan ditambah pula massa yang banyak, maka PKS akan mudah memenangkan pemilu di Indonesia.

2.7. Kaderisasi

PKS sebagai Partai Kader memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionalis partai. Kaderisasi PKS sendiri memiliki sebuah fungsi yang sangat banyak untuk partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infrastruktur kelembagaan partai yang tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat ranting, fungsionalis berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia. (Furqon, 2004:209).

Bermula pembinaan pribadi selanjutnya pembinaan keluarga, masyarakat dan lingkungan yang diawali dari pembinaan kader PKS itu sendiri. PKS memandang bahwa proses dakwah parlemen hanya bisa dilakukan dengan pribadi-pribadi yang shaleh. Jika jiwa pribadi bersih otomatis dakwah akan berjalan dengan lancar. Membentuk jiwa yang bersih menjadi sebuah kunci untuk membentuk keluarga yang shaleh. Berangkat dari keluarga-keluarga itulah yang akan membentuk masyarakat yang islami. Individu merupakan alat masyarakat dan negara yang terpenting dalam melaksanakan tugas sosial politik demi membangun cara untuk berhasil di dakwah parlemen. (Furqon, 2004:210).

PKS mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam pelatihan hierarkis yang disebut *marhalah*. Pelatihan ini mencakup proses pembelajaran (*ta'lim*), pelatihan keorganisasian (*tandzim*), pembinaan karakter (*taqwin*) dan evaluasi (*taqwim*). Dalam sumpahnya sebagai anggota PKS, kader harus mengucapkan **baiat** secara lengkap dengan membaca *dua kalimat syahadat*.

Dengan demikian, sistem sumpah ini tidak memungkinkan non-Muslim menjadi kader PKS. Namun sesuai hasil Munas 2010 di Jakarta, PKS membedakan antara kader dan anggota. *Kader* adalah *anggota* yang terikat oleh sistem kaderisasi, sehingga sudah pasti seorang Muslim. Sementara *anggota* adalah siapa saja yang terikat kepada organisasi dan bersifat lebih umum dan terbuka.

Berbagai upaya kerja keras, cerdas, dan ikhlas ini berbuah manis. Perekrutan dan pengkaderan PKS yang tetap mengandalkan gerakan jam'ah Tarbiyah ini menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Mereka mendukung dan memilih PKS dalam pemilu karena merasa cocok dengan apa yang dicitrakannya. Selain dari masyarakat umum yang tidak berafiliasi ke ormas keagamaan tertentu, simpatisan PKS juga berasal dari kalangan Islam tradisionalis, Islam modernis maupun Islam fundamentalis, dan kelasykan Islam lainnya. PKS yang bermula dari kampus dengan pendukung kalangan mahasiswa ini telah berhasil meluaskan jangkauan dakwahnya hingga ke masyarakat umum perkotaan, pesisir, pedesaan, pedalaman, dan termasuk masyarakat Kebumen.

Secara umum, pengkaderan di kalangan PKS terdiri dari tiga jenis, yakni Tarbiyah, pengkaderan *underbow* PKS, dan yang terakhir adalah pengkaderan formal kepartaian PKS itu sendiri. Tiga jenis pengkaderan ini merupakan kesatuan yang saling menopang dan bahkan sering bertemu dalam satu bentuk dan satu event yang sama sehingga tiga lapis pengkaderan ini acapkali terlihat tumpang tindih. *Pertama*, Pengkaderan Tarbiyah merupakan pembinaan suatu kelompok kecil (Halaqoh) berkisar 5-10 orang di bawah bimbingan *murabbi*. Kegiatan seperti ini pada awalnya dilakukan di kampus-kampus, tapi seiring berkembangnya dakwah ke masyarakat, akhirnya pembinaan Tarbiyah ini dilakukan di kalangan masyarakat umum.

Sistem pengkaderan Tarbiyah PKS adalah sistem pengkaderan utama di partai. Sistem ini nampaknya merupakan adopsi pengkaderan Tarbiyah Ikhwanul Muslimin. Hal ini meliputi landasan filosofis, ideologis, dan *mab'da* (prinsip) keagamaan, *manhaj* (metode), tujuan dan target pendidikan. Tarbiyah PKS hanya melakukan adaptasi terbatas terkait dengan materi pendidikan serta menghilangkan sarana pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia. (Rahmat, 2008:240).

Landasan *mab'da* Tarbiyah PKS bersumber dari prinsip prinsip Ikhwanul Muslimin. Prinsip prinsip Islam ini tidak mengalami penambahan dan pengurangan sedikitpun. Islam yang lurus ini tercermin dalam dua puluh prinsip Islam yang dirumuskan oleh Imam Hasan Al Bana. Konsep Islam kaffah yang menjadi ideologi utama serta corak pemahaman Islam Tarbiyah PKS bersumber dari prinsip prinsip tersebut. Dalam modul manajemen Tarbiyah diharapkan menghasilkan kriteria yang diharapkan oleh PKS. (Rahmat, 2008:242).

Mengenai *manhaj* dan pemantapan, PKS mengadopsi pendekatan *tadarruj* (*gradual*) yang diterjemahkan dalam pentahapan yang dirumuskan Ikhwanul Muslimin, yakni:

- a *Ta'aruf* (pengenalan)
- b *Tanfidz* (pelaksanaan)
- c *Takwin* (penguatan)

Sementara mengenai sarana pendidikan Tarbiyah PKS melakukan adaptasi dengan memakai sarana *usroh* atau sering kita sebut *halaqoh*, *dauroh* (ceramah), *taushiah* (ceramah singkat), seminar, bedah buku, *mukhayam* (kemah), *mabit* (bermalam), *rihlah* (berwisata), baca buku, taklim rutin PKS, bakti sosial, *tarhib* (ibadah khusus) Ramadhan, kajian fiqh dan belajar *taksin*. (Rahmat, 2008:242).

Aspek utama dalam jaringan Tarbiyah PKS adalah masjid kampus. Masjid kampus menjadi fokus kelembagaan

jejaring sosial dan keagamaan jamaah Tarbiyah. Tumbuhnya minat dalam mempelajari agama dan meperaktikannya bisa difasilitasi melalui masjid kampus. LMD (Lembaga Mujahid Kampus) sejak tahun 1974 menyelenggarakan praktik praktik reguler. LMD juga mempengaruhi perkembangan jejaring Tarbiyah. (Muhtadi, 2012:121).

LDK sendiri dijadikan wadah formal para aktivis dakwah melalui rekrutmen pada mahasiswa baru. Terakhir jejaring sumber daya organisasi Tarbiyah memiliki hubungan dengan KAMMI. Pembentukan KAMMI dalam perjuangan menuntut reformasi menjadi tahap transformasi perjuangan jamaah Tarbiyah dalam menggunakan institusi yang lebih formal dan transparan dalam memperjuangkan cita cita sosial dan politiknya. (Muhtadi, 2012:122-123).

Pengkaderan Tarbiyah di kampus kampus sangatlah penting karena selain berdakwah di kampus juga mencari bakat-bakat intelektual untuk direkrut ke dalam kader partai. Dalam memahami sistem pengkaderan PKS, perlu menelaah sistem pengkaderan Tarbiyah PKS di kampus-kampus. Pelaksanaan pola Tarbiyah di kampus-kampus secara umum mengikuti tiga tahapan yaitu: *Ta'rif*, *Tanfidz*, dan *Takwin*, *Ta'rif* adalah fase pengenalan Islam kepada objek dakwah melalui berbagai sarana, baik melalui pendekatan personal maupun pendekatan masal. (Rahmat, 2008: 244). Dalam dakwah kampus, tahap ini diimplementasikan dalam bentuk pendekatan personal (*dakwah fardhiyah*) yakni seorang aktivis dakwah kampus secara khusus dan intensif melakukan pendekatan dan interaksi personal dengan calon objek dakwah. (DPP PKS,2008:89).

Selain itu bentuk kedua dari *Ta'rif* adalah daurah (training) dalam rangka rekrutmen yang diikuti sejumlah mahasiswa, biasanya dilakukan pada hari hari libur. Dalam acara yang berlangsung selama 1 hingga 2 hari, peserta training diperkenalkan dasar akidah Islamiyah. Kemudian bentuk ke 3

adalah marhalah *Ta'rif* yaitu penerbitan berbagai media informasi yang dikelola di kalangan tarbiyah, seperti mading, Rohis, buletin Rohis hingga penyebaran majalah Islam. Bentuk ke empat dari *Ta'rif* adalah program mentoring mahasiswa terhadap peserta baru oleh ADK (Aktivis Dakwah kampus). (DPP PKS,2008:91).

Jika dilihat dari fakta lapangan, biasanya peserta yang telah mengikuti tahap *Ta'rif* ini menerima makna positive dan cenderung berubah menjadi lebih islami. Perubahan perubahan tersebut antara lain seperti, penggunaan jilbab, memanjangkan jenggot, dan pembiasaan menggunakan idiom bahasa Arab. Para peserta didik ini memiliki solidaritas yang tinggi jika ada salah satu peserta yang terkena musibah langsung di bantu satu sama lain. (DPP PKS,2008:92).

Sementara itu, tahap takwin (pengkaderan) dimulai ketika objek dakwah yang terekrut dalam *Ta'rif* dinilai serius dan berpotensi menjadi Aktivis Dakwah Kampus. Pembinaan pada tahap ini dilakukan dalam halaqoh Tarbiyah, yaitu kelompok kecil yang berisikan 5 sampai 10 orang yang dibimbing oleh murabbi (pembimbing). Proses pembinaan berjalan intensif dalam pertemuan (*liqa*) yang dilaksanakan sepekan sekali. Dalam liqa tersebut peserta Tarbiyah diberikan kurikulum yang diterbitkan oleh PKS. Kurikulum ini bakukan PKS untuk dijadikan modul management Tarbiyah.

Di dalam modul Tarbiyah tersebut menyajikan satu di antara sekian materi materi halaqah. Harapan dari modul tersebut untuk mempermudah para murabbi dan para aktivis Tarbiyah dalam melakukan aktivitasnya. Modul tersebut juga berharap mampu menjembatani kelangkaan bahan kajian aktivis Tarbiyah. (Yasmin,2009:4).

Setelah melewati fase tahapan *Ta'rif* dan *takwin* masuk ke tahapan ke tiga yaitu *Tanfidz*. Tahap *Tanfidz* adalah tahapan realisasi kerja kerja dakwah. Para aktivis yang sudah mengikuti tahap takwin atau yang dinilai sudah siap, diarahkan menjadi

pekerja pekerja dakwah kampus yang sering disebut Aktivis Dakwah Kampus. Pada tahap ini, pengendalian kerja dakwah bukan lagi dilakukan oleh halaqoh, tetapi di struktur dakwah yang ada di setiap kampus atau fakultas..

Proses pengkaderan Tarbiyah bisa dikatakan sukses, jika setelah dikembangkan menjadi sistem pengkaderan di pengkaderan resmi Partai Keadilan Sejahtera. *Manhaj* dakwah PKS tidak berbeda dengan yang berlaku di Tarbiyah, manhaj ini kemudian diletakan sebagai tahap awal pengkaderan, yakni anggota pemula. Pada perkembangannya, PKS kemudian mengembangkan manhaj Tarbiyah lanjutan yang diperuntukan bagi anggota muda, madya, dan dewasa yang diselaraskan dengan jenjang pengkaderan dan pembinaan kader partai, pelatihan kepartaian, training dasar, training lanjutan, dan kegiatan lainnya. (Rahmat, 2008. 273).

Sistem pengkaderan Tarbiyah PKS yang lebih holistik menjadikan seorang da'i yang produktif dan mampu menanggung beban dakwah. Sedangkan misi yang dipatok PKS dalam manhaj Tarbiyah adalah:

- a Menyiapkan seorang Dai yang memiliki pengetahuan keIslaman.
- b Menyiapkan seorang Dai dalam mengembangkan bakat pribadi demi kamandirian.
- c Menyiapkan Dai yang memiliki berbagai keterampilan belajar maupun keterampilan hidup.
- d Menyiapkan seroang Dai yang memiliki Ilmu pengetahuan kontemporer sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan metode dan kehidupan di masyarakat.
- e Menyiapkan seorang Dai untuk berdakwah secara profesional dengan mengenal lingkungan sosial masyarakat terutama lingkungan sosialnya.

f Menyiapkan seorang Dai yang berkemampuan membangun masyarakat madani.

Program kerja PKS dengan menerapkan management Tarbiyahnya bisa dikatakan berhasil. Pasalnya peserta didik Tarbiyah di didik dari kecil sampai ketinggian dewasa, dan dari orang yang biasa biasa saja menjadi orang yang luar biasa untuk berdakwah, baik itu berdakwah di parlemen maupun berdakwah di masyarakat. Kunci dari keberhasilan PKS mendapatkan atau melahirkan kader-kader yang solid berasal dari jejaring Tarbiyah ini. Selain itu lulusan dari pengkaderan Tarbiyah ini bisa dipromosikan atau menduduki kursi penting di partai dengan melewati tahapan tahapan terlebih dahulu.

Misi Tarbiyah PKS ini nampaknya berhasil, pasalnya banyak Dai yang memiliki kemampuan yang hebat di lingkungan bangkan dalam ruang lingkup nasional. Setelah menerima pembelajaran awal dari Tarbiyah seseorang secara mengejutkan menjadi Da'i yang disiapkan untuk berdakwah di lingkungan. Ini menandakan pola pengkaderan Tarbiyah yang dilakukan PKS terhadap peserta Tarbiyah sangat berguna untuk masyarakat dan PKS sendiri.

Secara jelas bahwa kaderisasi PKS unik dan berbeda dengan partai partai lain. PKS mampu melahirkan pendukung dan kader yang solid karena sudah dididik dengan managemen Tarbiyahnya. Bisa dianalisis bahwa walaupun PKS dalam kondisi apapun tetap memiliki pendukung yang setia dan terus menerus mendukung dakwah PKS. *Kedua*, Pengkaderan *Underbow*. Organisasi underbrow PKS mengembangkan pola pengakaderan sendiri sendiri. Organisasi organisasi underbrow PKS seperti Garda Keadilan, Serikat Pekerja

Keadilan (SPK), Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Selain kelompok kelompok yang secara formal bukan *underbow* PKS namun berafiliasi secara ideologis kepada PKS, seperti ROHIS dan LDK. Contoh pola pengkaderan yang khas. daripada ROHIS dikenal sebagai pengkaderan yang disebut dengan Latihan Dasar Kepemimpinan, sementara di LDK (Lembaga Dakwah Kampus) ada pembinaan yang bernama Kajian Rutin. (Rahmat, 2008: 239). Organisasi atau kelompok ini cukup solid, dan memiliki daya juang yang tinggi untuk berdakwah di lingkungan masyarakat. Mereka pun sering melakukan gerakan gerakan bantuan jika ada musibah yang menimpa daerah-daerah di Indonesia.

Ketiga, Pengkaderan Formal Kepartaian. Pengkaderan formal partai dilakukan secara resmi oleh kepengurusan dari Dewan Kepengurusan Ranting (DPRa) hingga Dewan Pengurus Pusat (DPP). Ada tujuh jenjang dalam pengkaderan formal ini yakni, TOP 1 (Training Orientasi Partai Satu), TOP 2; TDI (Traning Dasar Satu). TD 2 ; TL 1 (Training Lanjutan Satu), TL 2, dan training management dab kepemimpinan sosial (TMKS). Pengkaderan formal ini merupakan sarana pemibinaan kader sekaligus penjenjangan bagi mereka yang akan berimplikasi pada distribusi peran dan posisi struktural di PKS.

Kaderisasi formal PKS dilakukan dengan tujuh jenjang. Ketujuh jenjang tersebut antara lain:

- a Training Orientasi Partai 1 (TOP 1). TOP 1 ini yakni rekrutmen Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang dilakukan satu sampai akhir pekan. Pada training ini

peserta Tarbiyah diperkenalkan pemahaman dasar tentang eksistensi dan struktur pengenalan PKS.

- b Training Orientasi Partai 2 (TOP 2). TOP 2 dilakukan dengan *halaqoh* yang dipimpin oleh *murabbi* dan setelah lulus menyandang Anggota Pemula Terbina.
- c Training Dasar 1 (TD 1). TD 1 diikuti oleh peserta yang sudah lulus dalam jenjang pertama. Tahap ini diperuntukkan kepada anggota muda (Muayid). Dalam tahap ini kurikulum akan fokus pada pendalaman nilai nilai keagamaan.
- d Training Dasar 2 (TD 2). TD 2 ini adalah lanjutan dari Tarbiyah anggota muda. Pada level ini, manhaj Tarbiyah yang digunakan adalah manhaj Tarbiyah anggota madya. Lulusan level ini menyandang predikat Anggota Madya.
- e Training Lanjutan 1 (TL 1). TL 1 adalah jenjang akhir manhaj Tarbiyah PKS, yakni manhaj Tarbiyah anggota dewasa. Materi yang diperuntukkan adalah dasar dasar keIslaman, pengembangan diri, dakwah dan pemikiran Islam, wawasan masyarakat.
- f Training Lanjutan 2 (TL 2). TL 2 ini tetap harus mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan oleh PKS. Setelah lulus dari TL 2 ini kemungkinan para peserta didik dinominasikan untuk jabatan jabatan didalam partai.
- g Training Management dan Kepemimpinan. Di training ini peserta benar benar di didik dan persiapkan untuk anggota inti di PKS. Lulusan dari Training ini adalah mencapai predikat Anggota Purna yang merupakan anggota tertinggi di dalam perjenjangan PKS.

Selain tahap-tahap pengkaderan (*training*) di atas ada beberapa anggota yang tidak melewati fase tahapan

seperti ini. Anggota yang tidak melewati *training-training* tersebut di anggap anggota kehormatan. Anggota yang diangkat berdasarkan kriteria kriteria tertentu, misalkan ketokohnya yang sudah dikenal masyarakat, atau karena keahliannya dalam bidang tertentu. Tapi anggota kehormatan ini tetap harus mengikuti orientasi partai yang disebut Orientasi Partai dan Tokoh (OPT).

2.8. Jejaring PKS

Jalur jejaring yang digunakan PKS sesuai dengan jalur pengkaderan tarbiyah, yang memanfaatkan gerakan-gerakan di kampus. Sistem pengkaderan PKS yang paling terkenal adalah pengkaderan Tarbiyah yang sekarang lebih dikenal dengan kegiatan *Liqo* (Pertemuan) dan *mentoring* yang menjadi posisi kunci bagi pengkaderan PKS. Sistem pendidikan Tarbiyah di kampus kampus yang dilakukan oleh PKS ini dilestarikan, diatur, diformalkan, dan distandarkan. Untuk itu DPP PKS telah memproduksi modul panduan yang menjadi acuan resmi pengkaderan di partai ini. Pada tahun 2003, PKS menerbitkan sebuah modul berjudul “Management Tarbiyah Anggota Pemula”.

Kemudian pada tahun 2005 terbit modul yang lebih lengkap, dan diperuntukan bagi anggota madya, serta anggota dewasa. Modul tersebut berjudul Manhaj Tarbiyah PKS. Modul yang dipakai PKS ini mencoba memperkenalkan ideologi dan pemikiran anggota PKS dalam proses dakwahnya. Rahmat,2008:240). Dalam hal ini terdapat poin positif yaitu pengajaran dakwah Islam, walaupun tidak semua strateginya dapat diterapkan dengan baik di Indonesia.

Modul yang diterapkan PKS berbeda dengan modul modul partai lain. Isi dari modul tersebut

memang memperkenalkan cara berfikir PKS, tapi di sisi lain modul tersebut mengajarkan kepada anggota untuk mengerti bagaimana cara berdakwah & berpolitik di parlemen, sistem organisasi partai Islam (PKS) dan tentunya memperluas wawasan keislaman. Selain memperkuat sistem rekrutmen dan kaderisasi, PKS juga mengembangkan berbagai organisasi-organisasi melalui bidang kependuan dan olahraga yang berfungsi sebagai "sayap partai" dan berafiliasi secara formal dengan partai, seperti Garda Keadilan, organisasi pemuda Gema Keadilan, Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), serta Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS).

Ada juga organisasi di bidang Kebijakan Publik yang mengurus teritorial politik dan berhubungan dengan kelompok pemikir yang berafiliasi formal atau tidak formal dengan PKS, yaitu antara lain: Serikat Pekerja Keadilan (SPK), Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), *Central for Indonesian Reform* (CIR), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), *Institute for Economics Studies* (INFES), *Institute of Students and Youth for Democracy* (INSYD) dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS).

2.9. Pembingkai Ideologi Transnasionalisme

Sebuah ideologi dalam analisis politik digunakan untuk menggambarkan tentang pandangan alamiah yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Ideologi Partai Keadilan Sejahtera berasal dari pemikiran Ikhwanul Muslimin yang memandang Islam sebagai agama sekaligus negara yang menolak gagasan sekulerisme. Islam dipandang sebagai ajaran yang mengandung keseluruhan aturan hidup yang harus

diwujudkan dalam masyarakat dengan melakukan jihad sebagai bentuk perjuangan untuk merubah situasi yang dipandang belum Islami menjadi Islami.

Pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai metode dakwah yang mempunyai karakteristik berbeda dengan jama'ah islamiyah lain. Karakteristik yang membedakan antara lain: (Jabir,1998:347).

- a. *Rabbaniyah*: Tujuan dari seluruh kegiatan adalah terwujudnya kedekatan dengan Allah SWT.
- b. Universal: Dakwah diarahkan ke seluruh umat manusia, karena umat manusia adalah saudara dari Bapak yang sama.
- c. Islamiah: Islam sebagai karakteristik utama.
- d. Komprehensif: Mencakup seluruh aliran kontemporer yang menjadi firkah untuk mencakup seluruh aspek perbaikan yang meliputi atas: (al-Banna, 2003)
 - 1) *Dakwah Salafiyah*: Menyerukan gerakan kembali kepada Islam yang bersumber pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.
 - 2) *Thariqah Sunniah*: Mewajibkan diri mereka mengamalkan Sunnah yang suci dalam segala hal.
 - 3) *Haqiqah Shufiyah*: Asas kebaikan adalah kesucian jiwa
 - 4) Lembaga politik: Menuntut perbaikan pemerintahan dan menegakkan khilafah.
 - 5) Organisasi olah raga: Mu'min yang kuat lebih baik dengan mu'min yang lemah, dan seluruh beban yang diberikan Islam tidak mungkin dapat dilaksanakan secara sempurna kecuali dengan tubuh yang kuat.

- 6) Organisasi Ilmiah dan Budaya: Islam menjadikan mencari ilmu sebagai kewajiban atas setiap muslim dan muslimah.
 - 7) Lembaga ekonomi: Islam sangat memperhatikan pengelolaan harta benda dan upaya mendapatkannya
 - 8) Pemikiran sosial: Berusaha untuk mendapatkan solusi bagi segala persoalan masyarakat Islam.
- e. Membebaskan loyalitasnya dari setiap pemerintahan dan partai-partai yang tidak berpijak atas dasar Islam.
 - f. Menjauhi wilayah perselisihan Fiqih, sebab mereka mempunyai keyakinan bahwa perbedaan dalam hal furu' merupakan persoalan yang tidak dapat dielakkan akibat perbedaan akal manusia dalam memahami nash..
 - g. Menjauhkan diri dari *kooptasi* kelompok elite politik , karena dakwah harus independen sehingga tidak dimanfaatkan atau diarahkan oleh seseorang diantara mereka.
 - h. Menjauhi partai-partai politik sebab antar partai politik terdapat pertentangan dan saling bermusuhan.
 - i. Mengutamakan aspek amaliyah.
 - j. Sambutan luas para pemuda atas dakwah.
 - k. Dakwah Ikhwanul Muslimin sangat cepat menyebar.

Ideologi dan manhaj dakwah Ikhwanul Muslim boleh dikatakan sama dengan PKS, karena sama-sama menganggap bahwa Islam sebagai sebuah ideologi yang sempurna (*Syumuliatul Islam*) yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Manhaj dakwah PKS pun sama dengan Ikhwanul Muslim. PKS sama-sama memprioritaskan pendidikan individu agar menjadi pribadi muslim, dan memilih dakwah yang bersifat gradual. Menurut PKS perjuangan menegakkan islam yang *syumul* harus dimulai dari individu. Jika individu telah terdidik pemahaman

keislamannya maka dengan sendirinya islam akan tegak sebagai siste kehidupan. Selain itu secara gradual harus ada upaya perubahan sistem yang tidak dengan sesuai dengan sistem islam. Upaya PKS menjadikan demokrasi menjadi sarana perjuangan dinilai sebagai sebuah strategi garaduaasi penegakan Islam. (Rahmat, 2008:235).

Ideologi PKS dapat dilihat pada keterangan Majelis Syura' PKS tentang Kebijakan Umum Partai yang mengatakan bahwa berangkat dari prediksi akan menguatnya kesadaran politik masyarakat seiring dengan pengokohan ideologi di tubuh partai politik, maka perlu dibuat kebijakan dasar untuk mengantisipasi adanya konflik di kalangan aktivis partai, kebijakan dasar itu adalah;

- 1) Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi umat yang menjadi landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.
- 2) Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT; pembebasan manusia dari kefajiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam; dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup.
- 3) Operasionalisasi ideologi Islam dan cita-cita politiknya di atas tiga prinsip, yaitu: Pertama: Kemenyeluruhan dan finalitas sistem Islam, Kedua: Otoritas syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan al- Sunnah, dan ijtihad (proses kreativitas berpikir). Ketiga: Kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan setiap zaman dan tempat.

Imdadun Rahmat mensinyalir PKS yang merupakan kepanjangan tangan dari Partai Masyumi dan banyak terwarnai oleh ideologi perjuangan Ikhwanul Muslimin—

sebuah organisasi keagamaan yang didirikan Hasan Al Bana di Mesir dan kemudian berkembang luas ke pelbagai negara—memiliki *hidden* agenda, yakni mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Imdadun berpendapat demikian setelah mengamati dan meneliti berbagai agenda dakwah PKS, seperti aktivitas PKS dalam upaya menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan berbagai atributnya. PKS mengagendakan transformasi ideologi masyarakat dari ideologi rekaan manusia menjadi ideologi Islam. Artinya PKS menghendaki ideologi lain, seperti kapitalisme, sosialisme, nasionalisme termasuk ideologi Pancasila, disingkirkan dari pemikiran masyarakat dan digantikan dengan ideologi Islam. Oleh karena itu, tidak mengada-ada jika banyak pihak yang meragukan komitmen PKS terhadap bentuk negara kebangsaan dalam koridor Pancasila. (Rahmat, 2008: 120).

Islam sebagai ideologi oleh Partai Keadilan Sejahtera merupakan manifestasi dari kerangka pemikiran yang menyatu dengan ide atau dogma yang digariskan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ideologi yang dianut oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai Islam lebih menekankan pada nilai-nilai Islam dalam menjalankan visi, misi serta agenda partainya. Ideologi Islam yang digunakan oleh Partai Keadilan Sejahtera lebih ditentukan oleh faktor keagamaan sebagai penentu program partai.

Pembangunan budaya politik yang menjadi kebijakan umum dari PKS, dengan menokohkan Islam sebagai sumber budaya kehidupan politik, mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin dalam perilaku politik, membangun budaya rasionalitas dalam kehidupan politik, serta mengembangkan budaya *hisbah* (mawas diri). Langkah politik di atas diharapkan mampu membangun partisipasi politik dengan lahirnya kesediaan masyarakat

untuk berpartisipasi politik melalui PKS.(Rahmat, 2008: 120).

Pada era 1980-an. pembinaan atas LDK oleh kader-kader DDII ini mengalami *diskontinuitas*. Kemudian dilanjutkan oleh para da'i baru, yakni para alumnus Timur Tengah yang kemudian mengarahkan pembinaan di LDK menjadi Tarbiyah.(Rahmat, 2008). Alumnus Timur Tengah memegang peranan penting, mereka memberikan semangat baru, menyumbangkan pemikiran, dan perbaikan dakwah kampus. Merekalah yang memformulasikan model pendidikan di LDK sehingga sistem pendidikan **Tarbiyah Ikhwanul Muslimin** diterima dan dikembangkan di kalangan aktivis dakwah kampus. Pada saat kehadiran merekalah (akhir 1980-an) sebagian besar jaringan LDK memilih orientasi ke Ikhwanul Muslimin. Selain menerjemahkan buku-buku Ikhwanul Muslimin, para aktivis generasi pertama PKS, seperti Salim Al-Jufri, Rahmat Abdullah, Abu Ridlo, dan Hilmi Aminuddin, serta generasi kedua PKS, seperti Hidayat Nur Wahid, Yusuf Harun, Abdul Hasib, Nasir Zein, Surahman Hidayat, Satori Ismail, dan Daud Rasyid juga aktif dalam membina kelompok-kelompok Tarbiyah. Mereka bahu-membahu dengan para aktivis yang berasal dari era awal LDK yang pada umumnya berasal dari perguruan tinggi umum di Indonesia.

Para alumnus Timur Tengah berperan menjadi tenaga-tenaga *murabbi* (pendidik) yang mengisi ceramah dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Alumni Timur Tengah yang memiliki kelebihan dalam penguasaan terhadap pemikiran Ikhwanul Muslimin menjadi ideolog-ideolog yang handal. Selain itu, mereka juga menjadi penceramah di radio, televisi, menulis buku, mengelola

penerbitan dan menjadi nara sumber di seminar-seminar yang diikuti oleh kalangan luas.

Intensitas pengumpulan alumnus Timur Tengah meningkat ketika aktivis generasi ketiga seangkatan dengan Annis Matta, Aunurrofiq, Jazuli Juwaini, dan Muhammad Syamlan berdatangan dari Timur Tengah maupun LIPIA Jakarta. Kehadiran generasi yang lebih muda lulusan Timur Tengah di gerakan Tarbiyah ini memberikan banyak kemajuan bagi persebaran jaringan dakwah dan kedalaman materi dakwah. Sejak mereka ikut memperkenalkan pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin, banyak mahasiswa yang kemudian lebih serius menekuni dan mendalami materi maupun *manhaj* dakwah Ikhwanul Muslimin.

Kehadiran para alumnus Timur Tengah ini juga berkontribusi merumuskan sebuah sistem pengkaderan dalam konteks Tarbiyah. Hal ini menyebabkan mudahnya penerimaan terhadap *manhaj* gerakan dakwah Tarbiyah karena sistematikanya lebih tertata dengan baik. Pelatihan keislaman seperti LMD (Membaga Mujahid Dakwah) menghasilkan banyak aktivis muda Islam yang lebih bersemangat. Dari proses ini lahirlah tokoh-tokoh generasi ketiga PKS yang datang dari kampus umum. Mahfudz Siddik, Muzammil Yusuf Radzikun, Fahri Hamzah, Mustafa Kamal, Zulkiflimansyah, Priatna, Suswono, dan Rama Pratama adalah sebagian dari mereka. Ekspresi kesemangatan itu terlihat dari keinginan kuat mereka untuk terus mencari dan mempelajari banyak hal berkaitan dengan perjuangan Islam.

Di samping pemakaian sistematika yang lebih baik, utuh, mendalam, dan lebih kaya dalam penyampaian materi, kehadiran mereka juga memperkaya pendekatan dan jenis-jenis kegiatan. Melalui kegiatan yang beraneka ragam,

seperti *liqo*, *mabit*, *rihlah*, *mukhayam*, seminar dan bedah buku, gagasan-gagasan mereka tersebar lebih luas' transformative, dan lebih mudah tersosialisasikan. Bersama para aktivis Tarbiyah jaringan dakwah kampus, mereka juga membentuk lembaga-lembaga dakwah yang memberikan sumbangan tidak kecil bagi keberhasilan dakwah. Lembaga-lembaga yang mereka dirikan, antara lain: lembaga bimbingan belajar "Nurul Fikri", lembaga dakwah "Khoiru Ummah", lembaga pendidikan Islam 'Al-Hikmah", lembaga pengkajian "Sidik" kelompok-kelompok kesenian Nasyid, dan majalah "Sabili". Sementara berbagai penerbit buku, yang ikut menyebarkan gagasan dan pemikiran mereka, antara lain: Al-Ishlahy Press, Gema Insani Press, Pustaka Al-Kautsar, Robbani Press, Itishom, Era Intermedia, dan As-Syamil. (Rahmat, 2008: 122-123.

Dalam persebaran Tarbiyah tersebut', juga terdapat andil para da'i lulusan Timur Tengah yang berkultur pesantren. Para da'i yang telah memiliki pengalaman mengajar agama dan ber-tabligh di tengah, masyarakat ini menambah kualitas pendidikan dan peng-kaderan di Tarbiyah. Selain itu, para da'i ini juga memperluas wilayah edar (ekspansi) Jama'ah Tarbiyah ke pesantren-pesantren dan ke masyarakat luas. Tokoh-tokoh seperti K.H.Rahmat Abdullah (lulusan pesantren Asy-Syafi'iyah), K.H.Didin Hafiedhudin, K.H.Ahzami Sami'un, K.H. Muslih Abdul Karim, dan K.H. Yusuf Supendi, adalah contoh dari elemen pesantren ini.

Di kalangan aktivis Tarbiyah juga terdapat tokoh-tokoh yang selain aktif di Tarbiyah juga aktif di organisasi mahasiswa Islam, seperti PII, GPI, IMM, dan HMI,. Para kader yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan pengorganisasian ini juga turut berperan dalam mengisi kepemimpinan dan menggerakkan roda organisasi di

Tarbiyah. Kombinasi kerja yang kompak dari lima elemen utama Tarbiyah yang sebagian besar didukung oleh orang-orang berkultur modernis (Masyumi) dan mahasiswa perguruan tinggi umum yang pada *ghalib*-nya berasal dari keluarga berkultur *abangan* ini menghasilkan pertumbuhan jaringan dakwah yang makin lama makin dahsyat. Dilihat dari pertumbuhan jaringan dakwah kampus, perkembangan anggota dan persebarannya, menunjukkan tingkat akselerasi yang mengagumkan.